



RINGKASAN

LUFFY ANGGA INDRADHI. Perlakuan Akuntansi atas Utang Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor (*Accounting over the debt fund security social on (BPJS Kesehatan) branch of Bogor City*). Dimbing oleh RATIH PRATIWI.

Indonesia terus memperbaiki segala sektor untuk merubah statusnya menjadi negara maju, salah satunya di sektor kesehatan. Indonesia dengan BPJS Kesehatan sebagai medianya, memiliki visi untuk terjaminnya kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program yang dibuat BPJS Kesehatan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah program JKN-KIS.

Program JKN-KIS ini merupakan program dimana peserta harus membayar iuran kepesertaan berdasarkan kelasnya yang nantinya peserta dapat mengklaim pelayanan kesehatannya ke instansi kesehatan yg bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Klaim yang diterima instansi kesehatan diklaimkan kembali ke BPJS Kesehatan yang mengakibatkan timbulnya utang dana jaminan sosial.

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah menjelaskan kebijakan utang usaha pada BPJS Kesehatan, menjelaskan pengakuan utang dana jaminan sosial, pencatatan untuk utang dana jaminan sosial, pengukuran untuk utang dana jaminan sosial, penyajian atau pelaporan untuk utang dana jaminan sosial, serta mengevaluasi kesesuaian antara Pemutakhiran Pedoman Akuntansi DJS BPJS dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Lokasi praktik kerja lapangan dilaksanakan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor pada 20 Januari 2020 hingga 20 Maret 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Tinjauan pustaka yg digunakan adalah menjelaskan tentang kebijakan utang usaha, perlakuan akuntansi perihal; pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian utang usaha.

Utang dana jaminan sosial merupakan utang yang timbul dikarenakan adanya klaim yang diajukan oleh instansi kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pengakuan dan pengukuran utang dana jaminan sosial mengacu pada pemutakhiran pedoman akuntansi DJS BPJS Kesehatan tahun 2019. Verifikasi menjadi hal penting untuk dilakukan agar utang dana jaminan sosial dapat diakui dan diukur. Pencatatan utang dana jaminan sosial dicatat dengan berbasis akrual. Utang dana jaminan sosial dilaporkan pada laporan posisi keuangan. laporan posisi keuangan disusun berdasarkan tahun takwim dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana sesuai dengan kegunaan laporan keuangan yaitu untuk memantau keuangan perusahaan semakin baik atau justru sebaliknya. Kesimpulan yang dapat diperoleh segala hal terkait perlakuan akuntansi yang dalam hal ini BPJS Kesehatan menggunakan Pemutakhiran Pedoman Akuntansi DJS BPJS telah sesuai dengan PSAK, mulai dari segi pengakuan, pencatatan, pengukuran, dan penyajian.

Kata kunci: Instansi Kesehatan, Klaim Pelayanan, Utang Dana Jaminan Sosial.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.